



**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/
BADAN PERTANAHAN NASIONAL
SEKRETARIAT JENDERAL**

Jalan Sisingamangaraja Nomor 2 Jakarta Selatan 12014 Kotak Pos 1403 Telepon: 7228901, 7393939 email : surat@atrbtn.go.id

**PENGUMUMAN
NOMOR 19/Peng-100.KP.03.01/XII/2024**

TENTANG

**HASIL AKHIR SELEKSI KATEGORI PELAMAR I
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024**

Sebagai tindak lanjut Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Tahun Anggaran 2024 dan menindaklanjuti surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 11016/B-KS.04.03/SD/K/2024 tanggal 25 Desember 2024 hal Penyampaian Hasil Seleksi Kompetensi PPPK Tenaga Teknis Tahun Anggaran 2024, bersama ini diinformasikan:

1. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kategori Pelamar I Pengadaan PPPK Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2024, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Peserta memenuhi persyaratan serta mengikuti dan lulus seluruh tahapan seleksi;
 - b. Peserta memenuhi kebutuhan berdasarkan peringkat pada hasil Seleksi Kompetensi Pengadaan PPPK Tenaga Teknis 2024 yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Nasional (Panselnas) dengan keterangan "R2/L" dan "R3/L" sebagaimana terlampir.
2. Adapun keterangan terkait kelulusan sebagaimana tercantum di atas, dapat diakses melalui akun Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (SSCASN) masing-masing;
3. Peserta yang dinyatakan Lulus Seleksi Kategori Pelamar I Pengadaan PPPK Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2024 akan diangkat sebagai Calon PPPK, dengan syarat:
 - a. Melakukan pengisian data diri serta mengunggah Surat Keputusan Pengangkatan PPNPN Tahun 2024, Kontrak Kerja PPNPN Tahun 2024, dan Slip Gaji PPNPN Bulan Januari s.d. Desember 2024, melalui tautan <https://orpeg.atrbpn.go.id/pemberkasan/> pada tanggal 1 s.d. 15 Januari 2025;
 - b. Melakukan pengisian Daftar Riwayat Hidup (DRH) dan menyampaikan kelengkapan dokumen secara elektronik melalui akun SSCASN masing-masing pada tanggal 1 s.d. 31 Januari 2025.

4. Adapun...

4. Adapun kelengkapan dokumen yang harus diunggah oleh Calon PPPK sebagaimana dimaksud pada angka 3 huruf b adalah sebagai berikut:
 - a. Pasfoto formal terbaru berlatar belakang warna merah menggunakan kemeja putih berkerah dengan rasio ukuran 4x6 (diperkenankan menggunakan jas warna hitam);
 - b. Ijazah asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar (ditambah penyetaraan bagi lulusan luar negeri, dan/atau surat keterangan perbedaan nama dari universitas/perguruan tinggi bila terdapat perbedaan data nama atau tanggal lahir antara ijazah dan Kartu Tanda Penduduk);
 - c. Transkrip nilai/daftar nilai asli sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar (ditambah penyetaraan bagi lulusan luar negeri);
 - d. Cetakan surat pernyataan 5 poin yang diketik dan ditandatangani sendiri oleh Peserta dengan tinta/pulpen warna hitam dengan meterai Rp10.000,- sesuai format sebagaimana tercantum pada Lampiran I Pengumuman ini;
 - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) asli yang sekurang-kurangnya masih berlaku sampai dengan Mei 2025 dan diterbitkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani asli yang terbaru (2025) dan ditandatangani oleh dokter yang berstatus PNS atau dokter yang bekerja pada unit pelayanan kesehatan pemerintah;
 - g. Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya (NAPZA) yang terbaru (2025) dan ditandatangani oleh dokter dari unit pelayanan kesehatan pemerintah atau dari pejabat yang berwenang pada badan/lembaga yang diberikan kewenangan untuk pengujian zat Narkoba dimaksud, serta melampirkan pemeriksaan hasil laboratorium;
 - h. Daftar Riwayat Hidup (DRH) yang diisi dan diunduh melalui SSCASN dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Peserta wajib mengisi data diri dan data riwayat pada DRH sesuai dengan kondisi terbaru;
 - 2) Peserta wajib mengisi Riwayat Pendidikan mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan jenjang pendidikan terakhir sesuai dengan kualifikasi pendidikan yang dilamar pada Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2024;
 - 3) Peserta wajib mengisi Riwayat Keluarga dengan lengkap, sebagai berikut:
 - a) Istri/Suami (wajib jika sudah menikah/bercerai);
 - b) Anak kandung (wajib jika sudah memiliki anak kandung);
 - c) Bapak dan ibu kandung (wajib diisi lengkap data bapak dan ibu kandung, paling sedikit memuat informasi “Nama Lengkap” dan status “Hidup/Meninggal”);
 - d) Saudara...

- d) Saudara kandung (wajib jika memiliki saudara kandung, paling sedikit memuat informasi “Nama Lengkap” dan status “Hidup/Meninggal”);
 - e) Bapak dan ibu mertua (wajib diisi lengkap data bapak dan ibu mertua jika sudah menikah, paling sedikit memuat informasi “Nama Lengkap” dan status “Hidup/Meninggal”).
- 4) Peserta wajib mengisi data nomor surat/tanggal surat/pejabat penanda tangan kelengkapan dokumen, yaitu:
 - a) Surat Keterangan Catatan Kepolisian (contoh penulisan nomor: SKCK/YANMAS/XXX/XII/YAN.2.3/XXX/INTELKAM);
 - b) Surat keterangan sehat jasmani (surat keterangan sehat rohani tidak perlu dituliskan);
 - c) Surat keterangan tidak mengonsumsi/menggunakan narkoba, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya.
 - 5) Peserta wajib mengunggah pasfoto terlebih dahulu sebelum melakukan pengunduhan/pencetakan DRH agar pasfoto muncul pada halaman depan DRH Perorangan;
 - 6) Peserta wajib mengunduh dan mencetak berwarna DRH Perorangan dan DRH Riwayat serta menandatangani dengan tinta/pulpen warna hitam dengan meterai Rp10.000,-;
 - 7) Pada hasil cetakan DRH Perorangan, peserta wajib menuliskan ulang dengan tangan menggunakan huruf kapital (balok) dan tinta/pulpen warna hitam pada kolom nama, tanggal lahir, dan tempat lahir Peserta yang bertanda *);
 - 8) Peserta wajib melakukan pemindaian (*scan*) berwarna pada hasil cetakan DRH yang telah ditandatangani, dengan halaman yang lengkap dan urut (DRH Perorangan dengan posisi tegak/*portrait* pada halaman pertama dan DRH Riwayat posisi mendatar/*landscape* pada halaman selanjutnya);
 - 9) Apabila menggunakan e-meterai, pembubuhan dilakukan setelah ditandatangani dan dituliskan huruf kapital (balok) pada data DRH Perorangan (halaman depan) serta posisi halaman lengkap dan sesuai.
5. Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada angka 3, Calon PPPK tidak melakukan pengisian data diri dan/atau tidak dapat memenuhi/melengkapi kelengkapan dokumen, maka yang bersangkutan dianggap tidak memenuhi syarat dan/atau dianggap mengundurkan diri sebagai Calon PPPK Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2024;
 6. Kepada Calon PPPK akan ditempatkan sesuai kebutuhan organisasi dan setelah mendapatkan Nomor Induk (NI) PPPK maka akan diminta untuk menandatangani kontrak perjanjian kerja serta kemudian diangkat sebagai PPPK Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2024 (akan diumumkan kemudian);

7. Bagi...

7. Bagi Peserta yang memberikan keterangan tidak benar/palsu/menyalahi ketentuan pada saat pendaftaran/pemberkasan/Pengangkatan Calon PPPK/Pengangkatan PPPK, maka Panitia berhak membatalkan kelulusan dan memberhentikan status yang bersangkutan sebagai Calon PPPK/PPPK;
8. Peserta yang dinyatakan lulus Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2024 bersedia menerima segala konsekuensi dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan surat pernyataan;
9. Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2024 tidak dipungut biaya apa pun, kecuali:
 - a. Biaya penyiapan dokumen pelamaran/pemberkasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Akomodasi dari/ke tempat seleksi, menjadi tanggung jawab pelamar.
10. Penetapan kelulusan adalah hasil dari diri sendiri, pelamar/orang tua/keluarga diimbau agar tidak memercayai apabila ada orang/pihak tertentu (calo) yang menjanjikan dapat membantu kelulusan dalam setiap tahapan seleksi dengan keharusan menyediakan sejumlah uang atau dalam bentuk lain;
11. Kelalaian dalam membaca Pengumuman merupakan tanggung jawab pelamar;
12. Keputusan Panitia Seleksi bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat;
13. Pelayanan dan penjelasan informasi (*helpdesk*) terkait Seleksi Pengadaan PPPK Kementerian ATR/BPN Tahun Anggaran 2024 dapat diakses melalui laman <https://sites.google.com/view/casnatrbpn>, yang akan direspon pada hari kerja Senin s.d. Jumat pukul 09.00 s.d. 16.00 WIB.

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk diketahui.

Dikeluarkan di Jakarta

pada tanggal 27 Desember 2024

Sekretaris Jenderal

Selaku Ketua Panitia Seleksi Pengadaan PPPK

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

Badan Pertanahan Nasional

Tahun Anggaran 2024,



Suyus Windayana

NIP 19670617 199303 1 001

Lampiran I Pengumuman

Nomor :19/Peng-100.KP.03.01/XII/2024

Tanggal :27 Desember 2024

FORMAT SURAT PERNYATAAN 5 POIN
PENGADAAN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA
KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/BADAN PERTANAHAN NASIONAL
TAHUN ANGGARAN 2024

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ... (nama lengkap dengan gelar)
Tempat dan Tanggal Lahir : ... (kabupaten/kota, tanggal lahir)
Agama : ... (agama sesuai KTP)
Alamat : ... (alamat sesuai domisili saat ini)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya:

1. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
2. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Calon PNS atau PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta atau pegawai lainnya antara lain pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah;
3. Tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, PPPK, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
5. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan saya bersedia dituntut di pengadilan serta bersedia menerima segala tindakan yang diambil oleh Instansi Pemerintah, apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar.

... (kabupaten/kota) , ... Januari 2025

Yang membuat pernyataan,

Meterai
Rp10.000,- (ttd)

... (Nama Lengkap)